

## MENELISIK *PUTRI CINA*, MENGELUH KESAHKAN MULTIKULTURALISME

**Heru S.P. Saputra**

*Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember  
heruespe@gmail.com*

### Abstract

*This article aims to discuss the values of multiculturalism and social identity that are reflected in the novel "Putri Cina" by Sindhunata. The result of the analysis shows that multicultural values appeared to start being sowed by the author. Nevertheless, the people of Indonesia can not be said as a multicultural society because there are many cultural praxis that are not based on tolerance and equality. In addition, there has been a binary opposi333pirit of multiculturalism should not be made openly. Nevertheless, Putri Cina contains the embryo to criticize racial discrimination, with orientation on the fulfillment of the political attitude of the authorities and communities to adopt the attitude of equality.*

---

**Key words:** multiculturalism, identity, ascriptive, Chinese, Javanese

---

### Abstrak

*Artikel ini bertujuan mendiskusikan nilai-nilai multikulturalisme dan identitas sosial yang terefleksi dalam novel Putri Cina karya Sindhunata. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai multikultural tampak mulai disemai oleh pengarang. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia belum dapat dikatakan sebagai masyarakat multikultural karena masih banyaknya praksis budaya yang tidak didasari sikap toleransi dan kesederajatan. Selain itu, juga masih berlangsungnya oposisi biner antara kaum dominan dan minoritas. Dalam novel Putri Cina terefleksi betapa peliknya persoalan diskriminasi identitas di Indonesia, yakni orang Cina di hadapan orang Jawa. Sindhunata relatif berhati-hati dalam mengkritisi persoalan rasial melalui permenungan tokoh utamanya sehingga dialog yang berproyeksi pada embrio sekaligus spirit multikultural tidak harus dilakukan secara lantang. Meskipun demikian, Putri Cina memuat embrio untuk mengkritisi diskriminasi ras dengan orientasi pada pemenuhan sikap politis dari penguasa dan masyarakat untuk menerapkan sikap kesederajatan.*

---

**Kata kunci:** multikulturalisme, identitas, askriptif, Cina, Jawa

---

## 1. Pendahuluan

Dalam rentang historis, sejak masa kolonisasi hingga hari ini, mozaik imajinasi sastra di Indonesia telah merangkum beragam khazanah sosial budaya. Hal itu paralel dengan sumber penciptaan dan proses kreatif yang dimiliki sastrawan Indonesia. Sumber penciptaan yang berembrio dari beragam kultur dan sastrawan yang berasal dari beragam kelompok sosial berimplikasi pada produk sastra yang beragam tematik. Salah satu benang merah yang merangkaikan keberagaman tersebut adalah lokalitas (warna lokal) dan etnisitas.

Sejak awal pertumbuhan kesusastraan Indonesia modern (1920-an), banyak karya yang telah mengakomodasi warna lokal (*local color*) dan nilai-nilai etnisitas sebagai bagian integral dalam menyuarakan fenomena sosial. Pada saat itu, warna lokal Minangkabau (atau Sumatra) cukup dominan. Hal itu tampak dari karya-karya terbitan Balai Pustaka. Dalam rentang berikutnya, pergeseran warna lokal yang dominan terus berlangsung, hingga pada tahun 1970-an warna lokal Jawa tampak lebih dominan dibanding Minangkabau. Pergeseran episentrum Minangkabau (Sumatra) ke Jawa menandakan produktivitas dan kanonisitas karya-karya pengarang dengan kultur Jawa semakin dinamis. Lebih lanjut, bagi pengarang generasi belakangan, tidak cukup rasanya hanya menggali lokalitas, tetapi juga mulai menarasikan isu-isu globalitas, atau bahkan gabungan lokalitas dan globalitas (glokalitas).

Sepanjang sejarah sastra Indonesia, unsur lokalitas atau nuansa warna lokal senantiasa muncul dalam karya-karya sastra Indonesia, apa pun *genre*-nya. Hal tersebut tampak dalam beberapa ulasan Sumadjo (1981; 1991). Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan tilikan Saputra (2010:583-607) dapat diketahui bahwa warna lokal dapat disajikan dalam berbagai aspek, misalnya tematiknya, karakteristik atau temperamen tokohnya, konteks sosial budayanya (tradisi, ritual), bahasa/dialeknya, stereotip nama tokoh, nuansa geografis/alam, maupun peristiwa-peristiwa yang khas dan unik. Refleksi warna lokal karya-karya yang menjadi tonggak pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia banyak diwarnai lokalitas Minangkabau. Logikanya sederhana, pengarang-pengarang yang dominan pada masa itu adalah pengarang-pengarang yang berlatar belakang Sumatra, khususnya kultur Minangkabau. Hal itu menjadi penanda bahwa pandangan dunia subjek kolektif Minangkabau, sengaja atau tidak, meresap dalam *attitude* (entah kognisi, afeksi, atau konasi/psikomotorik) subjektivitas pengarang. Karya-karya monumental seperti *Azab dan Sengsara* atau *Sitti Nurbaya*, *Salah Asuhan*, atau karya-karya lain seperti *Muda Teruna*, *La Hami*, *Salah Pilih*, *Jeumpa Aceh*, *Pertemuan Jodoh*, *Layar Berkembang*, dan *Merantau ke Deli* diciptakan pengarang atas spirit lokalitas Minangkabau. Nilai-nilai di dalamnya mengandung aspek perbenturan budaya, baik antara budaya tradisional dan modernitas, antara spirit progresif dan regresif, antara budaya timur dan barat, maupun benturan-benturan persepsi yang dilandasi oleh perseberangan pemahaman kultural. Kadar

intensitas warna lokal masing-masing novel tentu tidak seragam. Gambaran dominannya lokalitas Minangkabau tersebut setidaknya terbentang sejak 1920-an hingga sekitar 1940-an.

Dalam rentang berikutnya, dinamika mozaik kultur yang dinarasikan pengarang pun semakin beragam dan menyebar. Sebagai gambaran, karya-karya Gerson Poyk, misalnya, mencoba mengangkat lokalitas di Nusa Tenggara dan Bali. Lokalitas wilayah Sulawesi, khususnya Ujung Pandang (kini Makassar), diangkat oleh Aspar dan Sinansari Ecip. Sementara itu, kultur Madura (yang kental dengan nuansa pesantren) tidak dapat dilepaskan dari nama D. Zawawi Imron yang dikenal sebagai penyair "Celurit Emas". Sebagian besar puisi Zawawi diolah dari inspirasi ke-Madura-an. Kultur lain yang juga diangkat menjadi fakta sastra adalah kultur Dayak. Dalam novel *Upacara*, Korrie Layun Rampan mengeksplorasi ritual-ritual yang menjadi pranata budaya orang Dayak, khususnya suku Benuaq, di pedalaman Kalimantan.

Sementara itu, lokalitas dan kultur Jawa banyak mewarnai kesusastraan Indonesia, utamanya sejak 1970-an atau 1980-an. Sederet nama yang memperkuat statemen tersebut di antaranya Umar Kayam, Linus Suryadi Ag., Y.B. Mangunwijaya, Darmanto Jatman, Ahmad Tohari, Nh. Dini, dan Arswendo Atmowiloto. Umar Kayam melalui karya-karyanya, di antaranya *Sri Sumarah*, *Bawuk*, dan *Para Priyayi*, mencoba memotret realitas kultural Jawa, baik melalui karakteristik tokoh-tokoh dengan pribadi Jawa maupun *mapping* tentang struktur sosial masyarakat Jawa. Hal senada juga dieksplorasi oleh Linus dalam *Pengakuan Pariyem*, dan Arswendo dalam *Canting*. Struktur sosial dan relasi sosial antara *bendara* dengan *kawula* dituturkan secara sistemik dalam karya-karya mereka. Sebagai fakta sastra, nuansa budaya feodal dalam karya-karya tersebut masih cukup kental dalam merepresentasikan realitas sosial masyarakat dan budaya Jawa. Dengan nuansa yang agak berbeda, budaya Jawa juga dikemas oleh Mangunwijaya dan Darmanto dalam karya-karyanya. Keduanya mencoba mendialogkan kultur Jawa dengan kultur non-Jawa, termasuk juga dengan kultur asing dalam konteks globalitas. Nh. Dini menyoal kultur Jawa dalam implikasinya dengan konteks relasi perempuan dan laki-laki. Sementara itu, Tohari lebih banyak mengungkap budaya dan tradisi Jawa, khususnya subkultur Banyumasan.

Selain gambaran keragaman kultur di Nusantara sebagaimana telah dipaparkan, kultur Tionghoa juga cukup mewarnai kehidupan sastra Indonesia. Hal tersebut tampak dari karya-karya Tan Boen Kim, Kwee Tek Hoaij, Tio Le Soei, dan Koh Wat. Beberapa sastrawan lain, baik yang masih terkait garis keturunan Cina maupun bukan, juga menyoal persoalan kehidupan orang Cina, seperti Lan Fang dalam *Pai Yin*, Remy Sylado dalam *Ca Bau Kan*, Naning Pranoto dalam *Miss Lu*, dan Zarra Zettira Z.R. dalam *Bibi Giok*. Secara umum, gambaran fakta sosial Cina dalam karya-karya mereka, khususnya dalam konteks realitas sosial Indonesia, tetap menjadi pihak minoritas. Meskipun tokoh-tokoh naratif mereka lahir, besar, dan meninggal di Indonesia, serta secara legal-formal hukum positif telah menjadi

Warga Negara Indonesia (WNI), *toh* persepsi publik tetap negatif dan menganggap mereka bak orang asing.

Citra minoritas juga tergambar dalam novel *Putri Cina* karya Sindhunata. *Putri Cina* mengilustrasikan pencarian identitas dalam implikasinya dengan faktor askriptif, sosial, dan kultural. Ia menjadi potret buram yang secara semiotis memberi tanda betapa problematisnya identitas Cina di Indonesia apalagi hal tersebut dibenturkan dalam wacana multikulturalisme. *Putri Cina* menyuarakan keluh-kesah tragis Tionghoa di bumi Nusantara. Lalu, bagaimana gambaran keluh-kesah wacana multikultural dan persoalan identitas yang disuarakan Sindhunata dalam novel tersebut? Mampukah *Putri Cina* mengonstruksi harmoni sosial dalam relasi sosial antaretnis?

Tulisan berikut mencoba memberi pandangan terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar multikulturalisme, identitas, dan konstruksi relasi sosial tersebut. Berikut ini terlebih dahulu penulis dipaparkan konsep teoretis yang menjadi pijakan dalam memahami wacana multikultural dan persoalan identitas.

## 2. Kerangka Teoretis

Di Indonesia belakangan ini, multikultural merupakan wacana yang sedang *ngetren*, bukan hanya banyak diperbincangkan dalam berbagai forum, melainkan telah menjadi semacam "slogan baru". Multikultural bukan sekedar plural, bukan sekedar keberagaman, melainkan lebih pada sikap untuk menyediakan diri guna berlangsungnya mozaik mekanisme sosial kultural sesuai dengan konteks yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok sosial. Sebagaimana dijelaskan antropolog Suparlan (2008) bahwa multikultural merupakan keberagaman dalam kesederajatan dengan meniadakan stereotip dan prasangka, serta lunturnya batas antara budaya dominan dan minoritas. Multikultural atau multikulturalisme merupakan suatu ideologi. Dengan mengacu Nieto, Suparlan (2008) menjelaskan bahwa multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik perbedaan individual maupun kelompok, khususnya dalam perspektif budaya. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme juga merupakan sebuah perjuangan, yakni perjuangan untuk tercapainya kesederajatan dalam perbedaan. Perjuangan kesederajatan ini dimulai dari kesederajatan perbedaan yang bersifat askriptif. Askriptif merupakan perbedaan golongan sosial yang dibawa bersama dengan kelahiran atau keturunan dari orang tua seseorang dan berdasarkan atas tempat asal di mana seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Perbedaan askriptif terwujud sebagai perbedaan sukubangsa atau etnik atau rasial, perbedaan keyakinan keagamaan, perbedaan jender, dan perbedaan umur. Dalam konteks askriptif, dengan bahasa yang berbeda, Parekh (2008) menegaskan bahwa keragaman yang dirujuk oleh multikulturalisme meliputi *subcultural diversity* (transjender, anak-anak jalanan, orang tua tunggal, gay, dan lesbian), *perspectival*

*diversity* (perspektif feminisme), dan *communal diversity* (*indigenous people*, imigran, dan kepercayaan komunitas).

Suparlan (2004; 2008) juga menjelaskan bahwa salah satu fungsi multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat adalah meniadakan batas-batas sosial dan budaya yang biasanya berupa kesukubangsaan dan yang terwujud sebagai stereotip dan prasangka. Dalam fungsi tersebut, multikulturalisme dilihat sebagai pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan. Dalam pengakomodasian perbedaan-perbedaan tersebut harus terwujud dalam coraknya yang memperlihatkan kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Atau, dalam bahasa yang berbeda, Wattimena (2008) menggarisbawahi bahwa benturan budaya antara kultur minoritas dan kultur dominan haruslah disikapi dan dimaknai sebagai bagian dari dialog budaya, dan dialog merupakan satu-satunya mekanisme yang memungkinkan, agar masyarakat yang terdiri atas beragam kultur bisa hidup secara harmonis.

Dalam multikulturalisme, kesederajatan tidak hanya terbatas pada perbedaan kebudayaan tetapi juga kesederajatan dalam produk-produk budaya (termasuk dalam ranah politik, hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial), kesederajatan dalam akses berbagai pelayanan ekonomi, dan kesejahteraan sosial kaum minoritas. Upaya untuk mengadopsi ideologi multikulturalisme juga harus ditopang melalui pendidikan formal (materi pendidikan multikulturalisme), informasi publik melalui media massa (cetak dan elektronik), penerbitan buku referensi, dan karya sastra (prosa, puisi, drama).

Pembicaraan tentang multikulturalisme berimplikasi pada persoalan identitas karena keduanya mengalami dialektika yang tak berujung. Dalam konteks realitas sosial, identitas pada umumnya didapat melalui mekanisme askriptif. Ia didapat lantaran menyatu dengan kelahiran dan keturunan sehingga pemerolehannya dilakukan secara hierarkis. Meskipun demikian, hal semacam itu bukan harga mati karena dengan intensitas relasi sosial maka memungkinkan dilaluinya dialog yang berimplikasi pada pengayaan, pergeseran, atau bahkan penguatan identitas, baik identitas sosial maupun identitas budaya.

Sebagaimana dipaparkan Piliang (2004), identitas dibangun berdasarkan diferensi, yakni pengakuan keserbaragaman dan sekaligus ketidakberpihakan. Ketidakberpihakan pada akhirnya akan diiringi oleh pernyataan ketidakacuhan terhadap kontradiksi, antagonisme, ironi, dan krisis. Di sisi lain, dengan mengacu pada pemikiran Gilles Deleuze dan Felix Guattari, Piliang (2004) juga menjelaskan bahwa identitas secara etnografis harus selalu bersifat interaktif, relasional, dan inventif. Sebagai ilustrasi, memasuki dunia yang satu sama lainnya telah bersatu disebabkan kemajuan teknologi informasi, setiap orang tak lagi otentik. Ia dijepit di antara dua kebudayaan yang berbeda, terlibat secara interaktif dan dialogis dengan kebudayaan lain sehingga suatu kebudayaan tidak bisa lagi mempertahankan integritas struktural dan normatifnya yang utuh.

Sebagaimana diketahui, identitas tidak bersifat esensial tetapi dibentuk secara kultural. Perbedaan kebudayaan tidak lagi merupakan perbedaan yang stabil dan eksotik bahkan identitas tidak saja bersifat inventif dan *mobile* tetapi juga sinkretis dan kreatif. Dalam konteks itu, pergantian identitas dalam kecepatan tinggi dimungkinkan, hal ini karena di dalam wacana multikulturalisme terbuka lebar pintu bagi reinterpretasi kebudayaan dan identitas, sebagai pemenuhan tuntutan diferensi dalam sistem produksi komoditi kapitalisme. Oleh karena itu, setiap bentuk kebudayaan berada dalam proses hibriditas yang terus-menerus.

Konsep multikultural dan identitas tersebut digunakan untuk memahami wacana multikultural dan persoalan identitas yang mengemuka dalam novel *Putri Cina*.

### 3. Pembahasan

Novel *Putri Cina* merupakan narasi tragis yang indah dan kaya nuansa permenungan hidup. Kisah tersebut meramu secara pekat antara fakta sosial, mitos, dan lintasan historis yang bermuara pada tragika kehidupan. Pengarang menelisik tragika melalui wawasan pengetahuannya yang luas dan kaya tentang filsafat dan mitos, baik dalam konteks area budaya Jawa maupun Cina atau Tionghoa. Pembahasan berikut difokuskan pada wacana multikultural dan persoalan identitas yang termuat dalam novel tersebut.

#### 3.1 Multikulturalisme: Kehilangan Wajah?

*Putri Cina* mengisahkan perjalanan hidup perempuan etnis Cina (direpresentasikan oleh tokoh bernama Putri Cina) yang penuh dengan permenungan dan keprihatinan lantaran terombang-ambing oleh ketidakpastian identitas etnis yang terimplikasi dari faktor askriptif. Dengan wawasan kecinaan (Sindhunata merupakan keturunan dari pasangan Liem Swie Bie dan Koo Soen Ling) dan kejawaan (Sindhunata lahir dan besar di lingkungan budaya Jawa, serta menggeluti secara intens budaya Jawa) yang luas yang dimiliki pengarang, tokoh Putri Cina dalam novel ini melesat menembus waktu dan zaman, antara zaman Majapahit hingga akhir Orba, khususnya bertepatan dengan momentum kerusuhan berdarah Mei 1998. Pengarang menggeluti kisah itu lewat pengetahuannya yang luas dan kaya tentang filsafat, mitos, dan khazanah kultural, baik Jawa maupun Cina. Tokoh Putri Cina bermetamorfosis sebagai Putri Campa pada zaman Prabu Brawijaya, Roro Hoyi pada zaman Amangkurat, Eng Tay pada legenda Sam Pek dan Eng Tay, dan hadir sebagai sosok Giok Tien pada zaman Kerajaan Medang Kamulan Baru.

Gambaran simbolis yang menembus antargenerasi, antaretnis, dan antaragama menjadikan novel *Putri Cina* berada dalam pusaran wacana multikulturalisme. Ia mewacanakan sekaligus mempertanyakan kesederajatan sosial di tengah keragaman kultural yang menjadi esensi multikulturalisme. Melalui *Putri Cina*, Sindhunata mengisyaratkan betapa fleksibel dan kontekstualnya identitas sosial-kultural, sekaligus membisikkan betapa tribalnya sikap yang bertentangan

dengan spirit multikulturalisme dengan memandang suatu kaum hanya dari faktor askriptif. Amanat yang terselip dalam *Putri Cina* bagaikan suara liris kebenaran di tengah hiruk-pikuk kejumawaan atau keluh-kesah empati kaum minoritas di hadapan kedigdayaan kuasa kaum dominan.

Untuk mengemas secara kontekstual, pengarang berupaya keras “membumikan” kisah yang bernafaskan Tionghoa ini dalam rengkuhan budaya Jawa, baik dalam implikasinya dengan filosofi, mitos, maupun aspek historis Jawa. Kemasan dalam “pembauran” tersebut secara teknis dilakukan oleh pengarang dengan mekanisme pembayangan atau *flashback* dengan bantuan frase khas yang mampu membersihkan masa lalu. Hal tersebut tercermin dalam beberapa pembuka bab dalam novel *Putri Cina* (PC) yang menggunakan frase pembayang, di antaranya frase “menurut dongeng Jawa” (PC:15), “dongeng tentang runtuhnya Kerajaan Majapahit” (PC:32), “alkisah, Perang Baratayuda di Padang Kurusetra” (PC:47), “syahdan, tersebutlah dahulu kala” (PC:59), dan “alkisah, Tanah Jawa memasuki babak baru” (PC:88). Mekanisme *flashback* tersebut bukan saja untuk menciptakan estetika cerita, melainkan juga untuk mengonstruksi pola substansi kisah kehidupan yang tidak lepas dari residu kisah-kisah historis, yang bermuara pada persoalan tahta, harta, dan wanita. Persoalan seperti itu merupakan persoalan historis yang senantiasa secara periodik berulang pada masa sekarang dan mendatang. Dengan kemasan semacam itu, persoalan ketimpangan multikultural dan krisis identitas yang coba disuarakan pengarang menjadi lebih sopan, modis, toleran, dan simbolis.

Poin penting dari novel *Putri Cina* adalah pencarian identitas di antara dua kutub oposisi biner Cina-Jawa di tengah-tengah maraknya wacana multikulturalisme dalam permainan politik diskriminasi yang kejam. Hal itu tergambarkan oleh kepedihan dan konflik batin yang mendalam pada diri Putri Cina hingga dirinya merasa “kehilangan wajah” seperti debu yang terbang terbawa angin dan terserak di luar kuasanya. Penderitaan lahir dan batin akibat diskriminasi dalam rentang waktu yang cukup panjang menjadikan Putri Cina pesimis atas identitas dan asal-usulnya meskipun sebenarnya ia mengetahui betul askriptifnya. Kepesimisan itu laksana igauan yang tak lagi jelas batas antara pertanyaan dan pernyataan, ketidaktahuan dan sindiran, kritikan dan imbauan, bantahan dan keluh-kesah. Ilustrasi kegalauan Putri Cina semacam itu dapat ditilik dalam kutipan novel *Putri Cina* (PC) berikut.

*“Antara Negeri Cina dan Tanah Jawa, mana tanah airnya? Kedua-duanya tidak, satu di antaranya pun tidak. Lalu di mana tanah airnya? Ia makin diganggu dengan pertanyaan yang tiada jawabnya: jangan-jangan karena bukan Cina dan bukan Jawa inilah yang membuat dirinya tak berwajah”* (PC:23).

Pertanyaan rasial itu ditimpali dengan pernyataan apatis atau keluh-kesah. Di antaranya tergambar dalam kutipan berikut.

*“Sia-sialah segala kerinduan untuk pulang ke tanah air, yang tidak ia ketahui di mana. Di sinilah, di Tanah Jawa ini, ia harus melengkapi takdirnya, dengan hidup sebagai Putri Cina, entah ia keturunan Cina asli dari Negeri Cina, entah ia keturunan Jawa ....” (PC:24-25).*

Ilustrasi dalam kutipan tersebut memberi gambaran betapa kalutnya orang-orang yang dilanda krisis identitas, lebih-lebih terjadi di tengah arus wacana multikulturalisme. Mereka dimarjinalkan baik secara sosial maupun hukum meskipun secara administratif mereka legal sebagai WNI. Kesederajatan dalam keberagaman menjadi pertanyaan yang tidak menemukan jawaban. Eksplorasi psikologis yang berakibat pada konflik batin tokoh utama dalam *Putri Cina* tersebut mirip dengan yang dicontohkan oleh Budi Darma (*Kompas*, 2005). Perbedaannya, Sindhunata membenturkan antara Cina dan Jawa sedangkan yang dicontohkan Budi Darma membenturkan antara Cina dan Amerika. Contoh yang dipaparkan Budi Darma juga mengusung problem krisis identitas. Budi Darma mencontohkan seorang pengarang Amerika keturunan Cina bernama Amy Tan, yang dari sejumlah karyanya selalu berujung pada pernyataan berikut.

*“Aku adalah orang Cina, tetapi benarkah aku orang Cina? Tidak benar, karena aku adalah orang Amerika. Namun, benarkah aku orang Amerika? Ah tidak, aku orang Cina”.*

Dalam realitas sosial, sebagaimana dalam pengalaman historis, orang Cina di Indonesia hampir tidak pernah mendapat pengakuan sosial secara sederajat dan proporsional. Hal itu berbeda dari orang Arab. Padahal, sebagaimana diketahui, secara historis, dalam zaman penjajahan Hindia Belanda, orang Cina dan orang Arab sama-sama menjadi kelompok perantara yang disebut sebagai Orang Timur Asing. Mereka memiliki posisi sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan orang Belanda atau kulit putih, tetapi lebih tinggi daripada posisi orang pribumi. Selama ini orang Arab di Indonesia merasa tidak ada masalah tetapi tidak demikian dengan orang Cina. Orang Cina hanya merasakan agak nyaman dalam relasi antarsuku dengan orang non-Cina di Indonesia hingga tahun 1960-an, terutama bagi mereka yang tinggal di Singkawang dan Pontianak (Kalimantan Barat). Setelah itu, mereka senantiasa merasakan perlakuan diskriminatif, bukan hanya diskriminasi sosial melainkan juga diskriminasi hukum. Puncak pengalaman paling pahit bagi orang Cina, lebih-lebih perempuan, terjadi pada 13-14 Mei 1998, di Jakarta.

Impresi mendalam terhadap peristiwa Mei 1998 menjadi tragika rasial yang menyejarah bagi orang Cina. Kerusuhan sosial yang dipicu oleh gonjang-ganjing politik dan kekuasaan tersebut menjadi momen yang tragis karena orang Cina menjadi korban meskipun tidak turut dalam arena permainan. Hal tersebut menunjukkan adanya pelampiasan rasial yang membabi-butu, di tengah gembar-gembor kesederajatan dalam keberagaman. Kekerasan rasial tersebut, terutama terhadap perempuan Cina, tergambar dalam kutipan berikut.

*Ketika mereka sibuk mengemas barang-barang yang akan mereka bawa mengungsi ke Negara Singa, mereka terkejut setengah mati, karena mendengar pintu rumah mereka didobrak keras-keras. Dan mereka melihat sekelompok orang bertopeng masuk, dan mendekati mereka. Giok Tien, Giok Hong, dan Giok Hwa ketakutan sampai pucat pasi. Sebelum sempat mereka menjerit, orang-orang bertopeng itu sudah membekap mulut mereka. Gion Tien melihat, orang-orang bertopeng itu menelanjangi kedua kakaknya, mempermalukan, dan akhirnya memerkosa mereka. .... Semuanya itu berlangsung dengan demikian cepat, kejam, dan ganas (PC:224).*

Jika ditarik pada tataran realitas sosial di lapangan dalam konteks keindonesiaan ataupun kebangsaan, secara umum orang Cina berada pada stratifikasi minoritas. Masyarakat Indonesia yang majemuk/plural, yang menekankan pada pentingnya kesukubangsaan, menurut Suparlan (2008), akan selalu menempatkan posisi orang Cina sebagai orang asing meskipun ia telah berstatus sebagai WNI. Sementara itu, bagi Faruk (2005; lihat juga Hermawan, 2005), problematika yang dihadapi orang Cina di Indonesia relatif kompleks dan selalu terombang-ambing, baik ketika situasi negara sangat kuat maupun ketika masyarakat sipil yang kuat. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor demografis, historis-politis, dan kultural.

Sebagaimana telah disinggung, sebenarnya antara Cina dan Arab memiliki riwayat yang tidak jauh berbeda dalam melakukan interaksi sosial antarkelompok etnik dengan Jawa. Namun, hanya Cina yang merasakan diskriminasi, baik diskriminasi secara vertikal dari negara maupun secara horizontal dari masyarakat. Tampaknya persoalan *pendapatan* (bukan *pendapat*) bisa menjadi variabel penting dalam menyulut sentimen antarsuku. Artinya, selama ini etnis Cina relatif menguasai sektor perdagangan di kantong-kantong bisnis hampir di seluruh Indonesia. Di berbagai kota di Indonesia muncul *Pecinan* sebagai pusat perdagangan. Lalu, salahkah dengan berangkat dari etos kerja yang baik dan insting bisnis yang kuat, orang Cina menjadi bisa memegang peranan penting dalam sektor perdagangan? Selain faktor ekonomi, faktor agama juga menjadi determinan dalam menyulut sentimen sosial. Agama Konghucu yang dianut etnis Cina memang tergolong minoritas. Padahal, kesalehan dalam beragama idealnya menjadi wilayah privat. Namun, kenyataannya tidak demikian. Lalu, haruskah persoalan agama boleh diintervensi? Haruskah orang Cina mengikuti untuk memeluk agama yang dominan? Ilustrasi tentang keturunan Cina di Filipina dan di Thailand yang tidak mengalami diskriminasi memang menarik karena orang Cina di kedua negara tersebut memeluk agama mayoritas, yakni di Filipina memeluk agama Katolik, sedangkan di Thailand memeluk agama Budha. Untuk Cina di Indonesia, haruskah demikian?

Dalam menghadapi persoalan yang pelik semacam itu, tampaknya strategi yang kemudian dilakukan oleh orang Cina adalah mengonsentrasikan perjuangan hidup pada sektor nonpolitik, khususnya ekonomi, dengan hasil yang benar-benar

maksimal, di satu pihak; sedangkan di pihak lain. Di samping itu, mereka juga mengonsentrasikan resistensi mereka pada penguatan solidaritas ke dalam dengan cara memperkuat ikatan etnis dan kekerabatan di antara mereka sendiri dan menutup diri dari kemungkinan ekspansi kelompok masyarakat lain ke dalamnya. Bagi Suparlan (2008), upaya utama yang bisa dilakukan adalah selalu menunjukkan secara sosial, ekonomi, dan politik bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia dan mereka adalah orang Indonesia. Selain itu, juga adanya kesadaran bersama yang dilandasi oleh ideologi multikulturalisme bahwa kesukubangsaan dapat dijadikan sebagai kekuatan sosial untuk menciptakan terwujudnya kohesi sosial di antara sesama anggota sukubangsa.

Sebagai informasi tambahan, dari berbagai studi etnografi, diketahui bahwa orang Cina merasa tidak senang kalau disebut Cina, tetapi lebih suka disebut orang Tionghoa. Bagi mereka, kata Cina merupakan stereotip penghinaan (karena mereka sering diteriaki "Cina, Lu!"). Mereka lebih suka disebut Tionghoa karena Tionghoa berarti kerajaan tengah atau pusat kerajaan di Cina, atau ingin diperlakukan sebagai orang kerajaan atau penguasa dari Cina yang datang dan hidup di Indonesia. Selain itu, juga ada sebutan *Chinese* (orang Cina dari luar Indonesia). Padahal, sebutan Tionghoa atau *Chinese* justru mengukuhkan bahwa mereka termasuk orang asing.

### 3.2. Identitas Semu

Sebagaimana telah dipaparkan, dalam konteks realitas sosial, identitas didapat melalui mekanisme askriptif. Ia didapatkan lantaran menyatu dengan kelahiran dan keturunan sehingga pemerolehannya dilakukan secara hierarkis. Meskipun demikian, hal semacam itu bukan harga mati karena dengan intensitas relasi sosial, memungkinkan dilaluinya dialog yang berimplikasi pada pengayaan, pergeseran, atau bahkan penguatan identitas, baik identitas sosial maupun identitas budaya.

Dalam novel *Putri Cina*, terbayang adanya mozaik potret buram identitas sosial atau kultural. Di sana digambarkan sekaligus dipertanyakan tentang identitas dalam konteks relasi antarsuku bangsa dan antaragama. Bagi Sindhunata, intensitas tinggi dalam relasi sosial antara orang Cina dan pribumi (Jawa) belum mampu memberi ruang yang leluasa dan nyaman bagi orang Cina untuk mengaktualisasikan identitas atau jatidiri. Masih kuatnya *attitude* sosial yang dilandasi oleh stigma, stereotip, dan prasangka terhadap mereka menjadi legitimasi sosial kultural betapa mereka masih diselimuti krisis identitas. Dialektika budaya antara budaya Cina dan Jawa yang terjadi selama ini di ruang-ruang publik belum mampu mencairkan batas antara yang dominan dan yang minoritas. Kedua pengarang tersebut mempertanyakan potret buram krisis identitas, sekaligus menawarkan gugatan imaji untuk menuju harmoni. Hal itu untuk mengantisipasi terwujudnya kekhawatiran bahwa dalam pencarian yang panjang dan melelahkan tersebut mereka tak lebih hanya akan menemukan identitas semu (*pseudo identity*).

Sindhunata dalam mengeluh-kesahkan atau *nggerundel* tentang identitas tercermin sejak pembuka hingga penutup novel *Putri Cina*. Ia bersuara meskipun lirih, ingin memberi penegasan tentang makna persaudaraan, persamaan, dan kesederajatan. Artinya, persoalan identitas adalah persoalan yang “cair”, sebagaimana dispiritkan dalam pepatah “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Dengan demikian, identitas Cina dan Jawa bukan lagi ranah area budaya yang harus dihadap-hadapkan (*vis a vis*). Orang Cina yang lahir, besar, dan meninggal di Jawa tidak lagi perlu dipertanyakan identitasnya masih Cina atau sudah Jawa. Sepanjang persoalan identitas semacam itu belum menjadi kesadaran publik maka era multikulturalisme hanyalah sebatas wacana yang “enak dibicarakan, tidak enak dilaksanakan”.

Sindhunata mengawali *Putri Cina* dengan mengutip sajak T'ao Ch'ien, yang berisi filosofi hidup dan kehidupan, *sangkan-paran*, serta hakikat persaudaraan. Dipaparkan secara simbolis bahwa persaudaraan secara hakiki bukanlah persoalan “akar”, asal-usul genetik, atau persoalan askriptif, yang bersumber dari material daging dan darah, melainkan persoalan bagaimana membangun toleransi sekaligus mempraktikkan sikap kesederajatan. Gambaran tersebut tampak dalam sajak T'ao Ch'ien -yang menjadi pembuka novel *Putri Cina*- berikut.

*Manusia ini tak punya akar.  
Dia diterbangkan ke mana-mana  
seperti debu yang berhamburan di jalanan.  
Ke segala arah, bertumbukan dengan angin  
ia jatuh terguling-guling.  
Memang hidup kita ini sangatlah pendek.  
Kita datang ke dunia ini sebagai saudara;  
Tapi mengapa kita mesti diikat pada daging dan darah? (PC:224).*

Kutipan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa relasi sosial dapat terjadi antar-berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda asal-usulnya. Namun, bukan perbedaan askriptif yang seharusnya dijadikan pijakan dalam saling memandang, melainkan bagaimana nilai positif dari masing-masing kelompok sosial bisa dijadikan bahan pembelajaran ke depan. Dengan demikian, identitas sosial tidak lagi bersifat statis, apalagi dogmatis, melainkan bersifat dinamis, “cair”, dan “mengalir” (*ngeli*).

Persoalan saudara, identitas, dan kesederajatan ditegaskan ulang pada *ending* novel *Putri Cina*. Sindhunata mendendangkan spirit humanistis melalui nyanyian anak-anak Cina yang hidup di Tanah Jawa, sebagaimana dikutip berikut.

*Di dunia ini semua manusia  
menanggung nasib yang sama,  
karena kita semua hanyalah debu,*

*Cina dan Jawa, sama-sama debunya.  
mengapa kita masih bertanya, siapakah kita?  
Toh dengan dilahirkan di dunia,  
kita semua adalah saudara? (PC:302).*

*Ending* novel tersebut mengingatkan ulang sekaligus menegaskan kembali bahwa Cina dan Jawa adalah saudara, "sama-sama debunya", yang seharusnya mampu mengonstruksi harmoni sosial sepanjang zaman. Ia harus dipahami dalam kesederajatan jika nilai-nilai multikulturalisme ingin diwujudkan dalam kehidupan sosial di bumi Nusantara. Cara pandang yang masih memegang erat oposisi biner antara dominan dan minoritas hanya akan mengukuhkan sikap sektarian yang menjauhkan dari rasa "kita semua adalah saudara". Hal itu berarti bahwa nilai-nilai multikulturalisme tidak akan tersemayam di bumi Nusantara.

Dari keluh-kesah yang terefleksi dalam *Putri Cina* terbayang adanya spirit untuk mengonstruksi nilai-nilai yang mengarah ke ideologi multikultural. Dalam mengonstruksi nilai-nilai multikultural, dimungkinkan pengarang yang satu memiliki *style* dan model yang berbeda dari pengarang lain. Masing-masing memiliki keunikan, sesuai dengan kreativitas dan proses kreatif masing-masing. Meskipun demikian, diharapkan visi pengarang mengarah ke upaya membangun karakter bangsa yang lebih adaptif, toleran, dan humanis, dengan kesadaran antidiskriminasi yang tinggi. Orientasi hilirnya mengarah pada hubungan sosial yang harmonis. Karya semacam itu perlu terus digalakkan dalam rangka untuk mengkonstruksi kognisi, afeksi, dan konasi atau psikomotorik publik, hingga membentuk harmoni sosial. Dalam spirit yang demikian, instrumen sastra multikultural dapat dijadikan sebagai alternatif media pemersatu sekaligus pemer kaya budaya bangsa.

Meskipun demikian, peran dan kebijakan pemerintah sangat signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan sastra multikultural. Sebagaimana yang ditegaskan Budi Darma (*Kompas*, 2005) ketika pemerintah mempunyai gairah politik untuk mendukung sastra, terjadilah "sastra perkauman" seperti di Malaysia, yang membawa sastra Malaysia berada pada kedudukan "duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi". Sebagai negara yang telah beranjak menuju multikultural, Indonesia mempunyai kesempatan menumbuhkembangkan sastra multikultural. Dengan campur tangan pemerintah yang memiliki kesadaran akan identitas semacam itu, persatuan bangsa bukan merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan, dan yang menjadi salah satu instrumen pentingnya adalah sastra multikultural.

#### 4. Penutup

Dari pembahasan novel *Putri Cina* dapat diketahui betapa peliknya persoalan diskriminasi orang Cina di Indonesia. Sindhunata relatif behati-hati dalam mengkritisi persoalan rasial melalui perenungan tokoh utamanya sehingga dialog yang berproyeksi pada embrio sekaligus spirit multikultural tidak harus dilakukan secara lantang. Sebagai catatan, digresi dalam narasi *Putri Cina* tampaknya kurang menguntungkan. Meskipun demikian, *Putri Cina* memuat embrio untuk mengkritisi

diskriminasi ras dengan orientasi pada pemenuhan sikap politis dari penguasa dan masyarakat untuk menerapkan sikap kesederajatan.

Pembacaan terhadap novel *Putri Cina* memberi gambaran bahwa nilai-nilai multikultural tampak mulai disemai oleh pengarang. Meskipun demikian, berdasarkan beberapa kajian dan rigiditas konsep ideologi multikultural menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia belum dapat dikatakan sebagai masyarakat yang multikultural karena masih banyaknya praksis budaya yang tidak disemangati sikap toleransi dan kesederajatan. Selain itu, juga masih berlangsungnya oposisi biner antara dominan dan minoritas, atau masih kuatnya sikap dan sifat stigmatisasi, stereotip, dan prasangka sosial.

#### Daftar Pustaka

- Faruk. 2005. "Etnis Tionghoa dan Persoalan Pluralisme di Indonesia", dalam Sainul Hermawan, *Tionghoa dalam Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Ircisod.
- Hermawan, Sainul. 2005. *Tionghoa dalam Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Ircisod.
- Kompas. 2005. "Sastra Multikultural Pemersatu Bangsa", dalam <http://osdir.com/ml/culture.region.china.budaya-tionghua/2005-11/msg00418/html>, diakses 2 Agustus 2010.
- Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Saputra, Heru S.P. 2010. "Yang Multikultural yang Beridentitas: dari Mozaik Imajinasi Menuju Spirit Harmoni" dalam Novi Anoeagrajeki, Sudartomo Macaryus, Endry Boeriswati (eds.), *Idiosinkrasi: Pendidikan Karakter Melalui Bahasa dan Sastra*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sindhunata. 2007. *Putri Cina*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumardjo, Jakob. 1981. *Segi Sosiologis Novel Indonesia*. Bandung: Pustaka Prima.
- Sumardjo, Jakob. 1991. *Pengantar Novel Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Hubungan Antar-Sukubangsa*. Jakarta: YPKIK.
- Suparlan, Parsudi. 2008. *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*. Jakarta: YPKIK.
- Wattimena, Reza A.A. 2008. "Multikulturalisme di Dalam Masyarakat Majemuk", dalam <http://rezaantonius.wordpress.com/2008/06/19/html>, diakses 25 Juli 2010.